



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>

Received: 3 April 2024, Revised: 13 April 2024, Publish: 15 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia

Taqy Fauzan Giyandri¹, Jona Bungaran Basuki Sinaga²

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Cilandak, Indonesia, taqyfauzan@gmail.com

² Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Cilandak, Indonesia, jonasinaga@ipdn.ac.id

Corresponding Author: taqyfauzan@gmail.com

Abstract: *In the context of Indonesian politics, the implementation of contemporary political theory faces complex challenges and dynamics. This article explores key factors influencing the implementation of political theory within a unique timeframe and geographical setting. The primary challenges involve adapting to globalization, which accelerates the exchange of ideas and policies. Meanwhile, addressing social inequality is a critical element that needs to be overcome to establish an inclusive policy framework. The dynamics of cultural identity also come into focus, requiring a profound understanding of ethnic diversity and local traditions. Information technology, with the rapid development of social media and data usage, shapes the political landscape in unprecedented ways. Increasing societal participation and evolving public expectations become determining factors in the dynamics of contemporary politics. Concurrently, adjusting to global demands, including environmental issues and human rights concerns, necessitates responsive and progressive policies. This article analyzes how contemporary political theory is adapted and applied in Indonesia, providing a deeper understanding of the unique challenges faced in integrating global political theory principles into the local context.*

Keyword: *Contemporary Political Theory, Challenges, Dynamics.*

Abstrak: Dalam konteks politik Indonesia, penerapan teori politik kontemporer dihadapkan pada tantangan dan dinamika yang kompleks. Artikel ini mengeksplorasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi implementasi teori politik dalam kerangka waktu dan keadaan geografis yang unik. Tantangan utama yang dihadapi melibatkan adaptasi terhadap globalisasi yang mempercepat pertukaran ide dan kebijakan. Sementara itu, ketidaksetaraan sosial menjadi elemen kritis yang perlu diatasi untuk menciptakan landasan kebijakan yang inklusif. Dinamika identitas budaya yang kompleks juga menjadi sorotan, memerlukan pemahaman mendalam terhadap keberagaman etnis dan tradisi lokal. Teknologi informasi, dengan cepatnya perkembangan media sosial dan penggunaan data, membentuk lanskap politik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dan ekspektasi publik yang berkembang menjadi faktor penentu dalam dinamika politik kontemporer. Sejalan dengan itu, penyesuaian terhadap tuntutan global, termasuk isu-isu lingkungan dan hak asasi manusia, memerlukan kebijakan yang responsif

dan progresif. Artikel ini menganalisis bagaimana teori politik kontemporer diadaptasi dan diterapkan di Indonesia, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan unik yang dihadapi dalam menggabungkan prinsip-prinsip teori politik global ke dalam konteks lokal.

Kata Kunci: Teori Politik Kontemporer, Tantangan, Dinamika.

PENDAHULUAN

Pemerintahan adalah suatu sistem atau struktur yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan publik dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Fungsi pemerintahan melibatkan pembuatan kebijakan, pelaksanaan program-program, serta pengawasan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintahan biasanya terdiri dari berbagai lembaga dan cabang, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kestabilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Tugas utama pemerintahan meliputi penyusunan undang-undang, alokasi sumber daya, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan strategis yang memengaruhi arah dan perkembangan suatu negara. Aspek-aspek penting dalam pemerintahan mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Pemerintahan juga dapat beroperasi dalam berbagai bentuk, seperti demokrasi, monarki, atau sistem otoriter, tergantung pada struktur politik dan nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat (Santoso, 2004).

Politik pemerintahan merujuk pada dinamika dan interaksi dalam pengelolaan urusan publik oleh suatu pemerintah. Ini mencakup proses pembuatan, pelaksanaan kebijakan, dan hubungan antar-lembaga pemerintah. Aspek-aspek politik pemerintahan melibatkan perumusan kebijakan, alokasi sumber daya, serta koordinasi di antara cabang-cabang pemerintahan. Partisipasi politik warga negara, diplomasi, dan konsep-konsep seperti keadilan sosial juga menjadi elemen kunci dalam politik pemerintahan. Sistem politik, apakah itu demokrasi atau otoriter, turut membentuk cara kekuasaan didistribusikan dan kebijakan dibuat. Dengan demikian, politik pemerintahan mencerminkan dinamika kekuasaan, nilai-nilai, dan aspirasi masyarakat yang menjadi landasan bagi pengelolaan negara (Firnas, 2016).

Politik kontemporer merujuk pada praktek dan dinamika politik yang terjadi dalam era saat ini. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan politik yang mencerminkan perkembangan terkini dalam masyarakat, teknologi, dan geopolitik. Politik kontemporer tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga melibatkan hubungan internasional, isu-isu global, serta respons terhadap perubahan-perubahansignifikan dalam tatanan dunia (Marwiyah *et al.*, 2022).

Dalam politik kontemporer, terdapat berbagai tren dan isu-isu krusial seperti globalisasi, isu lingkungan, ketidaksetaraan, hak asasi manusia, dan perkembangan teknologi. Perubahan ini mempengaruhi bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana kekuasaan didistribusikan, dan bagaimana partisipasi politik dilakukan. Sistem politik kontemporer mencakup berbagai bentuk pemerintahan, mulai dari demokrasi hingga otoriterisme, dan melibatkan aktor-aktor seperti pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan individu. Dinamika ini juga mencerminkan kompleksitas hubungan antarnegara dan tantangan global yang dihadapi oleh pemerintah dalam mempertahankan stabilitas dan memenuhi tuntutan masyarakat. Dengan demikian, politik kontemporer menjadi refleksi dari realitas yang terus berubah dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi, dan dinamika masyarakat global (Rachman and Santoso, 2023).

Latar belakang tantangan dan dinamika penerapan teori politik kontemporer di Indonesia tercermin dalam perjalanan sejarah dan perkembangan sistem politik negara ini.

Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami transformasi politik yang signifikan, beralih dari rezim otoriter menuju tatanan demokratis yang lebih terbuka. Namun, dalam konteks demokratisasi ini, sejumlah tantangan dan dinamika muncul, menguji kapasitas pemerintah untuk mengadopsi dan menerapkan teori politik kontemporer.

Salah satu aspek utama adalah keragaman yang mencolok di dalam masyarakat Indonesia, termasuk keberagaman etnis, agama, dan budaya. Tantangan utama bagi penerapan teori politik adalah bagaimana menyelaraskan kepentingan beragam ini dalam pengambilan kebijakan yang adil dan inklusif. Teori politik seperti liberalisme dan pluralisme menjadi relevan dalam menanggapi kebutuhan masyarakat yang heterogen. Dinamika politik juga dipengaruhi oleh masalah-masalah ekonomi, ketidaksetaraan, dan kemiskinan. Pemerintah dihadapkan pada tugas menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi yang adil dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip teori ekonomi politik dan keadilan distributif menjadi penting dalam mengatasi ketidaksetaraan (Ar Rasyid *et al.*, 2023).

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan fokus pada studi literatur. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan dinamika penerapan teori politik kontemporer di Indonesia melalui telaah konsep, argumen, dan temuan dalam literatur-literatur yang relevan. Studi literatur ini akan melibatkan analisis yang cermat terhadap teori politik seperti liberalisme, pluralisme, dan ekonomi politik, serta mengidentifikasi aplikasinya dalam kebijakan dan dinamika politik Indonesia. Dengan mendalaminya, penelitian ini berupaya untuk merinci sejauh mana teori politik ini tercermin dan diadaptasi dalam realitas politik Indonesia. Metode kualitatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kontekstual yang kaya dan mendalam terhadap isu-isu politik kontemporer yang dihadapi oleh Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Penerapan Politik Kontemporer

Dinamika penerapan politik kontemporer mencerminkan perubahan dan kompleksitas dalam cara pemerintahan dan masyarakat menghadapi isu-isu politik modern. Penerapan politik kontemporer tidak hanya melibatkan kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi juga melibatkan respons dan partisipasi masyarakat dalam menyikapi perkembangan zaman. Beberapa dinamika kunci yang mencirikan penerapan politik kontemporer meliputi.

1. Globalisasi

Globalisasi, sebagai fenomena yang terus berkembang, tidak hanya sekadar merinci percepatan pertukaran informasi, budaya, dan ekonomi antarbangsa, melainkan juga menjadi landasan paradigmatik yang membingkai dan membentuk dinamika penerapan politik di era kontemporer. Dalam era ini, terjalannya jaringan komunikasi dan interaksi global telah mendorong terciptanya realitas politik yang lebih terintegrasi dan saling ketergantungan.

Pengaruh globalisasi menciptakan tuntutan baru bagi pemerintahan dalam mengelola kebijakan-kebijakan domestik, menuntut keberanian untuk bersifat lebih terbuka terhadap berbagai pengaruh dan tantangan yang bersumber dari luar batas negara. Penerapan politik yang responsif terhadap arus informasi global, perkembangan ekonomi internasional, dan dinamika budaya menjadi esensial dalam menjawab tantangan global yang berkembang dengan cepat (Noorikhshan *et al.*, 2023).

Selain itu, globalisasi mendorong pentingnya kerjasama internasional dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Pemerintah dihadapkan pada realitas bahwa masalah-masalah seperti perubahan iklim, krisis kesehatan global, dan ketidakstabilan ekonomi tidak lagi dapat diatasi secara efektif dalam konteks nasional

semata. Kerjasama internasional menjadi imperatif, dan dinamika penerapan politik tidak hanya harus mencerminkan keterbukaan terhadap ide-ide dan praktik-praktik terbaik di dunia, tetapi juga kemampuan untuk bekerja sama dalam menanggapi isu-isu berskala global (Noorikhshan et al., 2023)

Lebih jauh, globalisasi mendorong pemerintahan untuk merinci strategi politik yang mampu menggabungkan identitas lokal dengan perspektif global. Tantangan ini memaksa penerapan politik untuk menavigasi dan mengelola keragaman budaya, nilai-nilai, dan kepentingan nasional dengan bijaksana, sambil tetap terbuka terhadap nilai-nilai universal dan aspirasi bersama di panggung dunia.

Dalam konteks globalisasi yang semakin rumit, penerapan politik harus mampu menyelaraskan kepentingan nasional dengan kerangka kerja global, menciptakan kebijakan-kebijakan yang tidak hanya memperhitungkan realitas lokal tetapi juga mengintegrasikan kearifan global. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang implikasi globalisasi dalam penerapan politik menjadi kunci untuk membangun fondasi kebijakan yang relevan, adaptif, dan efektif dalam menghadapi kompleksitas tantangan global di abad ke-21 (Ammarnurhandyka, 2023).

2. Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi, sebagai pilar utama dalam evolusi masyarakat informasi, menandai perubahan mendalam dalam lanskap politik, menuntut adaptasi dan transformasi dalam penerapan politik kontemporer. Tidak sekadar menjadi alat bantu, teknologi informasi telah menjadi katalisator perubahan mendasar dalam cara politik dijalankan, memperkenalkan dimensi baru dan mengubah paradigma tradisional (Marwiyah et al., 2022).

Dalam era teknologi informasi, media sosial telah memainkan peran kunci dalam dinamika politik. Penggunaan platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah melampaui batasan geografis dan memberikan akses langsung kepada politisi dan masyarakat untuk berinteraksi secara real-time. Kampanye politik tidak lagi terbatas pada ruang konvensional, melainkan meluas ke ranah digital, memungkinkan kampanye untuk mencapai audiens yang lebih luas, termasuk mereka yang sebelumnya tidak aktif secara politik.

Analisis data besar (big data) menjadi senjata utama dalam strategi politik kontemporer. Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan volume besar data memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku pemilih, tren opini publik, dan isu-isu politik. Dengan menggunakan algoritma dan model prediktif, keputusan politik dapat diinformasikan oleh analisis data yang kompleks, memungkinkan kampanye untuk disesuaikan dengan preferensi pemilih dan meningkatkan efektivitas pesan politik (Marwiyah et al., 2022).

Ketidaksetaraan dan keadilan sosial menjadi poin sentral dalam dinamika penerapan politik kontemporer, mencuatkan isu-isu yang mendesak untuk ditangani dan menciptakan tuntutan baru dalam rancangan kebijakan. Dalam konteks ini, pemerintahan dihadapkan pada tugas berat untuk merespons secara holistik terhadap isu ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia (Ammarnurhandyka, 2023).

Isu ketidaksetaraan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama yang memerlukan perhatian serius dari penerapan politik. Dinamika ekonomi global dan nasional seringkali menyebabkan kesenjangan antara kelompok sosial, menyulitkan akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya. Penerapan politik kontemporer harus mampu merancang kebijakan ekonomi yang menghasilkan distribusi yang lebih adil dan memperbaiki disparitas pendapatan (Ammarnurhandyka, 2023).

Selain itu, isu ketidaksetaraan sosial menyoroti disparitas dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Penerapan politik perlu mengakui bahwa ketidaksetaraan ini dapat menjadi penghambat potensi pembangunan sosial dan

ekonomi. Oleh karena itu, merancang kebijakan yang mendukung inklusi sosial, seperti peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan, menjadi imperatif dalam merespons ketidaksetaraan sosial.

Tidak kalah pentingnya, tantangan terkait pelanggaran hak asasi manusia menjadi bagian integral dari dinamika penerapan politik. Pemerintah harus bersikap tegas dalam menjaga dan mempromosikan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak minoritas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Melibatkan masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa kebijakan politik benar-benar mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Dalam menghadapi dinamika ini, penerapan politik perlu mengembangkan strategi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Ini termasuk langkah-langkah untuk menciptakan kebijakan fiskal yang lebih adil, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia. Melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi kunci untuk memastikan kebijakan mencerminkan berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dengan mendalaminya, penerapan politik kontemporer dapat menjadi agen perubahan positif dalam memerangi ketidaksetaraan dan memastikan keadilan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan analisis yang holistik terhadap isu-isu ini menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang relevan dan efektif untuk mencapai masyarakat yang lebih inklusif dan adil (Rachman and Santoso, 2023).

3. Krisis Lingkungan

Dalam era politik kontemporer, krisis lingkungan menjadi salah satu tantangan paling mendesak yang memerlukan perhatian serius dan aksi terpadu. Perubahan iklim dan isu-isu lingkungan lainnya menempatkan pemerintahan di garis depan untuk mengeksplorasi kebijakan yang berkelanjutan dan menjawab panggilan untuk bertindak secara signifikan. Dinamika kompleks terkait krisis lingkungan mencakup berbagai aspek, termasuk perubahan dalam pola konsumsi, keberlanjutan energi, dan keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan (Dharmawan, 2007).

Dalam merespons perubahan iklim, politik kontemporer perlu menggali kebijakan yang mengarah pada transisi ke ekonomi rendah karbon. Ini mencakup pengembangan dan promosi energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan penerapan teknologi bersih. Dinamika ini melibatkan transformasi dalam sektor energi, transportasi, dan industri untuk menciptakan model pembangunan yang lebih ramah lingkungan (Dharmawan, 2007).

Pola konsumsi juga menjadi fokus utama dalam dinamika penerapan politik terkait krisis lingkungan. Pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan, mengurangi pemborosan, dan memilih produk yang ramah lingkungan. Ini mencakup penerapan kebijakan pajak hijau, insentif untuk produk berkelanjutan, dan pendidikan masyarakat tentang dampak konsumsi terhadap lingkungan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang signifikan. Politik kontemporer perlu menciptakan mekanisme partisipasi publik yang efektif, memperkuat kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, dan memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan ekosistem.

Dalam menghadapi dinamika ini, politik kontemporer juga dihadapkan pada tuntutan untuk membangun kesadaran lingkungan. Pendidikan dan kampanye informasi menjadi bagian integral dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan lingkungan, memotivasi perubahan perilaku, dan memberikan dukungan terhadap kebijakan pro-lingkungan.

Melihat kerumitan dinamika ini, penerapan politik harus mengintegrasikan perspektif lintas-sektoral dan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Kebijakan lingkungan yang efektif memerlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang interaksi kompleks ini menjadi kunci untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Kemajuan Identitas dan Kebudayaan

Dalam konteks politik kontemporer, kemajuan identitas dan keberagaman budaya menjadi poin sentral yang membutuhkan pemahaman mendalam dan responsif dari penerapan politik. Pengakuan terhadap identitas dan keberagaman ini memperkaya dinamika politik dan menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan aspirasi serta kebutuhan berbagai kelompok masyarakat dengan cermat dan inklusif (Rachman and Santoso, 2023).

Pentingnya pengakuan identitas terutama tercermin dalam penanganan isu-isu etnis, agama, dan gender. Dalam era politik kontemporer, pemerintahan perlu menjembatani divisi dan merespons aspirasi masyarakat yang beragam dengan kebijakan yang inklusif. Mengakui dan menghargai keragaman etnis menjadi prinsip kunci untuk mengatasi ketegangan antar kelompok dan menciptakan masyarakat yang harmonis.

Isu agama juga memainkan peran krusial dalam dinamika penerapan politik. Pemerintah perlu menghormati kebebasan beragama dan menjaga keseimbangan antara kebijakan yang melindungi hak-hak individu dengan kepentingan umum. Pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama dan kebutuhan umat beragama menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang mencerminkan pluralisme dan toleransi (Rachman and Santoso, 2023).

Selanjutnya, gender menjadi dimensi penting dalam kemajuan identitas dan keberagaman budaya. Penerapan politik harus memperhitungkan ketidaksetaraan gender dan berusaha menghilangkan diskriminasi. Mempromosikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan melindungi hak-hak perempuan menjadi bagian integral dalam membangun masyarakat yang adil dan setara.

Lebih jauh, pemerintahan perlu melibatkan kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau kurang terwakili dalam proses politik. Memberdayakan kelompok-kelompok ini melalui partisipasi aktif dan konsultasi dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dinamika ini menciptakan ruang politik yang inklusif, di mana suara semua kelompok didengar dan dihormati.

Dalam menghadapi dinamika kemajuan identitas dan keberagaman budaya ini, penerapan politik perlu mengambil pendekatan yang holistik dan adaptif. Pemahaman mendalam terhadap konteks budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat menjadi landasan dalam membentuk kebijakan yang mampu merangkul keragaman. Hanya dengan memahami dan menghargai identitas dan keberagaman budaya, penerapan politik dapat menciptakan lingkungan politik yang inklusif, memperkuat kohesi sosial, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Tantangan Penerapan Politik Kontemporer

Tantangan dalam penerapan politik kontemporer melibatkan sejumlah aspek yang kompleks dan dinamis. Dalam menghadapi realitas politik yang terus berubah, pemerintah dan pembuat kebijakan dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kesuksesan implementasi kebijakan. Berikut adalah beberapa tantangan kunci yang perlu diatasi dalam menerapkan politik kontemporer (Ar Rasyid et al., 2023):

1. Ketidakpastian Global: Gejolak dalam geopolitik global, termasuk ketidakpastian ekonomi dan konflik internasional, dapat menghambat implementasi kebijakan nasional. Penerapan politik kontemporer harus mampu menavigasi dan merespons dinamika global yang berubah dengan cepat.
2. Teknologi dan Privasi: Kemajuan teknologi, mesin pembelajaran, dan penggunaan data besar membuka potensi baru dalam politik kontemporer. Namun, tantangan muncul terkait dengan privasi individu, keamanan data, dan potensi penyalahgunaan teknologi untuk tujuan politik yang tidak etis.
3. Polarisasi Politik: Tantangan dalam memitigasi polarisasi politik di masyarakat, yang dapat menghambat konsensus dan implementasi kebijakan. Meningkatnya ketegangan antarpartisipasi dan polarisasi opini publik menjadi tantangan dalam mencapai kesepakatan politik yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan yang efektif.
4. Perubahan Iklim dan Lingkungan: Krisis lingkungan, termasuk perubahan iklim, menghadirkan tantangan besar bagi penerapan politik. Menemukan keseimbangan antara kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan merupakan tantangan utama dalam konteks politik kontemporer.
5. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi: Masalah ketidaksetaraan ekonomi dan sosial menjadi tantangan yang perlu diatasi oleh kebijakan politik. Ketidaksetaraan dapat menciptakan ketidakpuasan masyarakat dan mengancam stabilitas politik, sehingga penerapan kebijakan yang mendukung inklusi sosial menjadi krusial.
6. Kesehatan Global: Krisis kesehatan global, seperti pandemi COVID-19, menunjukkan kompleksitas dalam menangani masalah kesehatan yang melibatkan aspek politik, ekonomi, dan sosial. Penerapan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap situasi kesehatan menjadi tantangan utama.
7. Isu Hak Asasi Manusia: Penerapan politik kontemporer harus menghadapi isu hak asasi manusia, termasuk perlindungan hak-hak individu, kebebasan berpendapat, dan mengatasi diskriminasi. Memastikan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi aspek krusial.
8. Perubahan Demografis: Perubahan demografis, seperti penuaan populasi dan migrasi, memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi. Penerapan kebijakan yang dapat menanggapi perubahan demografis dan memastikan inklusi masyarakat yang beragam menjadi tantangan yang kompleks.
9. Tantangan Digitalisasi: Peningkatan ketergantungan pada teknologi dan transformasi digital memunculkan tantangan dalam menyelaraskan perkembangan tersebut dengan kebijakan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mendukung inklusi digital.
10. Partisipasi Publik: Meningkatkan partisipasi publik yang efektif dalam proses pengambilan keputusan politik menjadi tantangan, terutama untuk memastikan bahwa suara semua kelompok masyarakat didengar dan diperhitungkan.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, dinamika penerapan politik kontemporer di Indonesia mencerminkan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam menghadapi dinamika global, pemerintah Indonesia harus memiliki respons yang adaptif dan inklusi. Aspek globalisasi membawa konsekuensi berupa tuntutan kerjasama internasional dan keterbukaan terhadap pengaruh global. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi memengaruhi cara politik dijalankan, memperkenalkan elemen baru dalam strategi politik kontemporer. Ketidaksetaraan dan keadilan sosial menjadi tantangan serius yang memerlukan kebijakan yang mendukung inklusi dan mengurangi disparitas di masyarakat. Krisis lingkungan, terutama perubahan iklim, menuntut kebijakan yang berkelanjutan dan berfokus pada perlindungan lingkungan. Di samping itu, penguatan

identitas dan keberagaman budaya memerlukan pendekatan yang inklusif dan menghargai keberagaman masyarakat Indonesia.

Tantangan tersebut menciptakan dinamika kompleks dalam penerapan politik kontemporer. Penggunaan metode penelitian kualitatif, seperti studi literatur, diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap isu-isu ini. Keseluruhan, pemerintah perlu menghadapi tantangan ini dengan kebijakan yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

REFERENSI

- Ammarnurhandyka, M. (2023) 'GLOBALISASI DALAM DINAMIKA KONTEMPORER: STUDI KASUS PERUBAHAN SOSIAL DAN TRANSFORMASI BUDAYA', *Journal Economic, Technology, Social and Humanities*, 1(1), pp. 1–6.
- Ar Rasyid, H.J. et al. (2023) 'Menjelajahi Etika: Tinjauan Literatur Terbaru tentang Prinsip-prinsip Etika, Konflik Moral, dan Tantangan dalam Kehidupan Kontemporer', *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), pp. 229–237.
- Dharmawan, A.H. (2007) 'Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor', *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(2), pp. 1–40. Available at: <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i2.5932>.
- Firnas, M.A. (2016) 'Politik Dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi Di Indonesia Era Reformasi', *Jurnal review Politik*, 06(01), pp. 160–194.
- Marwiyah, S. et al. (2022) *Dinamika Politik Teori Kontemporer*. Malang: UPM Press.
- Noorikhsan, F.F. et al. (2023) 'Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat', *Journal of Political Issues*, 5(1), pp. 95–109. Available at: <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131>.
- Rachman, A.A. and Santoso, G. (2023) 'Keterampilan Abad 21 Dalam Perspektif Sosial Dan Politik Mempersiapkan Generasi Muda Untuk Tantangan Kontemporer Angela', *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 02(04), pp. 2–5.
- Santoso, P. (2004) *Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*.